

TEORI-TEORI DALAM MANAJEMEN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Serly Meilani, Sahrul Ramadhan, Rini Syamia, Afriza, Rialis

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Serlymeilani576@gmail.com, Sahrulramadan99511@gmail.com, Rinisyamia03@gmail.com,
afriza@uin-suska.ac.id, Rialis1967@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pendidikan adalah suatu istilah yang sering dikenal dalam konteks pemerintahan atau berpolitik. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas dan berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijakan pendidikan didasari oleh pertimbangan akal dalam proses pembuatannya. Implementasi kebijakan pendidikan meliputi tahapan sosialisasi, penerapan kebijakan tanpa sanksi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan pendidikan juga harus memiliki sistematika yang jelas dan dapat dievaluasi. Analisis kebijakan pendidikan menjadi penting dalam era demokrasi dan revolusi industri 4.0. Pemerintah atau pihak yang mempunyai kewenangan harus mempelajari dan memahami substansi, alasan, dan akibat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori-teori yang berlaku dan di pergunakan dalam kebijakan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis kasus-kasus hukum terkait. Data dikumpulkan melalui artikel, jurnal, maupun berita pada media online yang berkaitan. Tahapan analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan pada kasus-kasus hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori-teori kebijakan pendidikan sebagai Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

Kata kunci: Teori, Kebijakan, Pendidikan

Abstract

Education policy is a term that is often known in the context of government or politics. The term policy has a very broad scope and is different from discretion. Educational policies are based on rational considerations in the process of making them. Implementation of education policies includes the stages of socialization, implementation of policies without sanctions, and policy evaluation. Education policies must also have clear systematics and can be evaluated. Education policy analysis is important in the era of democracy and industrial revolution 4.0. The government or parties with authority must study and understand the substance, reasons and consequences for society. This research aims to find out the theories that apply and are used in education policy. The research methods used include literature studies and analysis of related legal cases. Data was collected through articles, journals and news on related online media. The stages of data analysis are carried out starting from data collection, data simplification, data presentation, and drawing conclusions on related legal cases. The research results show that educational policy theories as educational policies must have clear and directed objectives to contribute to education.

Keywords: Theory, Policy, Education

Pendahuluan

Teori Kebijakan Pendidikan adalah kerangka pemikiran dan konseptualisasi yang mendalami proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di dalam sistem pendidikan. Teori ini menyelidiki dinamika kompleks yang melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan, nilai-nilai masyarakat, dan dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi perkembangan dan implementasi kebijakan pendidikan.

Dalam landasan teori kebijakan pendidikan, terdapat beberapa dimensi kunci yang memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu kebijakan pendidikan dapat

dirumuskan, diadopsi, dan dijalankan. Pertama-tama, teori ini mengakui pergeseran paradigma dalam bidang pendidikan dari waktu ke waktu, memperhatikan perubahan nilai-nilai masyarakat dan tuntutan global yang mempengaruhi arah kebijakan pendidikan.

Selain itu, teori kebijakan pendidikan juga mempertimbangkan keberagaman dan inklusivitas sebagai fokus utama. Pengenalan teknologi, inovasi metode pembelajaran, serta kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses dan hasil pendidikan menjadi elemen-elemen penting dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan.

Sebagai pedoman dalam pemilihan kebijakan, teori ini memberikan landasan analisis dampak sosial. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami implikasi kebijakan terhadap pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pengurangan ketidaksetaraan pendidikan.

Tentu saja, teori kebijakan pendidikan bukanlah entitas statis. Seiring perubahan konteks sosial, teknologi, dan ekonomi, teori ini terus berkembang untuk menjawab tantangan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian dan analisis teori kebijakan pendidikan menjadi suatu kontribusi kritis dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara global.

Dalam inti dari teori kebijakan pendidikan, terdapat kesadaran akan kompleksitas dan dinamika dalam pembuatan kebijakan. Proses ini melibatkan negosiasi antara berbagai kepentingan, refleksi nilai-nilai masyarakat, dan respons terhadap perkembangan masyarakat yang terus berubah. Sebagai bagian integral dari perbaikan dan inovasi sistem pendidikan, teori kebijakan pendidikan menjadi panduan esensial untuk membentuk masa depan pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berkesinambungan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu sumber tertulis yang berkaitan dengan subjek penelitian yang dikumpulkan melalui artikel, jurnal, publikasi ilmiah, berita internet, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan analisis yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

A. Teori Pluralisme

Pluralisme berasal dari istilah "*plural*" dan "*isme*", dengan "*plural*" yang mengacu pada banyaknya (jamak) dan "*isme*" yang merujuk pada paham atau teori. Oleh karena itu, pluralisme dapat didefinisikan sebagai pandangan atau teori yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi.¹

Dalam konsep ini, terdapat elemen fundamental dari pluralisme, yaitu kesediaan hati setiap individu untuk menerima keberagaman yang ada. Membangun "kesediaan hati" ini bukanlah tugas yang mudah, karena melibatkan kesadaran, latihan, kedewasaan jiwa, dan pengembangan diri. Pluralisme melibatkan upaya membangun kesadaran tidak hanya secara teologis tetapi juga secara sosial, mengakui bahwa manusia hidup dalam masyarakat yang beragam dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai aspek sosial lainnya.²

Pluralisme tidak hanya menggambarkan keragaman masyarakat secara fragmentaris, melainkan sebagai integrasi yang sejati dalam kehidupan beradab. Ini mencakup keberadaan dan toleransi terhadap keragaman etnis atau kelompok budaya dalam sebuah masyarakat atau negara.

¹ Pius A. P, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994),Hlm 604.

² Moh. Shofan, Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011),Hlm 48.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, teori pluralisme mengakui bahwa ada berbagai kepentingan, nilai, dan pandangan dalam sistem pendidikan, dan kebijakan pendidikan harus mencerminkan keragaman tersebut. Pendekatan pluralisme dalam kebijakan pendidikan menekankan pentingnya dialog, diskusi terbuka, dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. Prinsip dasar teori pluralisme adalah pengakuan terhadap pluralitas nilai dan pandangan dalam masyarakat, serta upaya menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua kelompok.³

1. Pendekatan Inklusif

Teori Pluralisme mengusulkan pendekatan inklusif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Ini berarti menciptakan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi dan mendukung berbagai kepentingan, kepercayaan, dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Dalam lingkup pendidikan, inklusivitas mencakup pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan individu dan kelompok, memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan diakui.

2. Partisipasi Publik

Teori Pluralisme mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan. Hal ini mencakup melibatkan masyarakat, orang tua, siswa, dan kelompok kepentingan lainnya dalam pembuatan kebijakan. Dengan memastikan partisipasi yang merata, teori ini berupaya untuk mencegah dominasi satu kelompok kepentingan atas yang lain dan menciptakan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan sebagian besar masyarakat.

3. Penanganan Konflik Nilai

Keragaman nilai dan keyakinan di masyarakat sering kali dapat menyebabkan konflik nilai. Teori Pluralisme mencari cara untuk menangani konflik ini dengan mempromosikan dialog dan pemahaman antara berbagai kelompok. Ini melibatkan pendekatan yang berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan yang bersaing, tanpa mengecualikan satu pihak demi pihak lain.

4. Keadilan dan Kesetaraan

Teori Pluralisme menekankan pentingnya menciptakan kebijakan pendidikan yang adil dan setara bagi semua. Ini mencakup distribusi sumber daya yang merata, akses yang setara terhadap peluang pendidikan, dan penanganan ketidaksetaraan yang mungkin muncul dalam sistem pendidikan. Keadilan pendidikan dalam teori ini mencakup hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.

B. Teori Elit

Teori elit berasumsi bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok yang mempunyai kekuasaan (penguasa/ elit) dan kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan (*massa*). Menurut teori elit ini, demokrasi yang diterapkan sepenuhnya memungkinkan adanya keberpihakan dalam pengambilan kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dihasilkan merupakan bagian dari preferensi politik para elit. Model ini lebih mempertimbangkan kepentingan elite dibandingkan tuntutan masyarakat. Jadi permasalahan politik yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pendidikan merupakan hasil konflik dan kesepakatan para elit politik, sedangkan masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang dibuat.

Oleh karena itu, diperlukan kearifan para elit politik untuk dapat merancang kebijakan yang berlandaskan kepentingan publik. Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti ditemukan

³ Knight, C., & Wiseman, A. W. Fondasi Baru untuk Memahami Keanekaragaman dalam Kebijakan dan Praktik: Implikasi Pendidikan Multikultural. *Kebijakan Pendidikan*, 20(2) (2006), 309–334.

bahwa keunggulan model elit adalah kebijakan dihasilkan lebih cepat dan tepat sasaran. berdasarkan prinsip- prinsip yang berpengalaman. pendapat dan teori, namun kebijakan tersebut tidak dikoreksi dari bawah, sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa kebijakan tersebut sudah ada dan harus dilaksanakan.⁴

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan teori elit:

1. Konsentrasi Kekuasaan Teori elit berpendapat bahwa kekuasaan politik tidak merata di masyarakat, melainkan terpusat pada segelintir individu atau kelompok yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya politik, seperti kekayaan, pendidikan, atau hubungan politik.
2. Siklus Kekuasaan elit- elit ini dapat mengendalikan siklus kekuasaan dengan memanfaatkan institusi-institusi politik dan ekonomi untuk mempertahankan posisi dominan mereka.
3. Interaksi Kelompok Teori elit menekankan pentingnya interaksi antara kelompok- kelompok elit dalam proses pembuatan keputusan politik. Elit- elit ini sering kali berbagi kepentingan yang serupa dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka.
4. Pengaruh Kepentingan Ekonomi Elit- elit sering kali memiliki kepentingan ekonomi yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka dapat menggunakan kekayaan dan akses ke pasar untuk memperkuat posisi politik mereka.
5. Akses Terhadap Informasi Elit- elit memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, baik itu melalui hubungan pribadi, akses media, atau pengaruh dalam lembaga- lembaga pemerintah.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, teori elit dapat diaplikasikan dengan menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kelompok- kelompok elit yang memiliki kepentingan politik, ekonomi, atau sosial tertentu. Hal ini dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan, serta penentuan kurikulum dan prioritas pendidikan secara keseluruhan.

C. Teori Kepentingan Publik

Teori Kepentingan Publik (*Public Interest Theory*) adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa regulasi harus bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan publik. Teori ini menekankan bahwa pejabat pemerintah seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Konsep kepentingan publik sendiri merupakan konsep yang dinamis dan terus berubah sesuai dengan waktu dan kondisi, dimana apa yang menjadi perhatian publik belum tentu merupakan kepentingan publik sebenarnya.

Public interest theory berpendapat bahwa pejabat pemerintah semestinya bekerja untuk kepentingan publik, "rakyat". Ini adalah persis seperti inti pernyataan Abraham Lincoln dalam Pidato Gettysburgnya yang terkenal, ketika dia mengatakan "*that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth*" atau dalam Bahasa Indonesia, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tidak akan binasa dari bumi.

Regulasi dalam teori kepentingan publik diberikan sebagai respon atas permintaan masyarakat akan perbaikan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dengan memperhatikan kepentingan publik secara luas. Dalam konteks ekonomi, regulator berusaha menemukan solusi pasar yang efisien secara ekonomi, terutama dalam mengendalikan kekuatan pasar perusahaan dalam situasi persaingan yang tidak sempurna. Pemerintah diharapkan dapat melindungi dan memenuhi kepentingan umum atau kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan umum,

⁴ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.

melindungi hak-hak masyarakat, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, teori kepentingan publik menjadi landasan penting dalam pembuatan regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵

D. Teori Pemikiran Kelompok

Teori Pemikiran Kelompok (*groupthink*) lahir dari penelitian panjang Irvin L Janis. Janis menggunakan istilah *groupthink* untuk menunjukkan satu mode berpikir sekelompok orang yang sifat kohesif (terpadu), ketika usaha-usaha keras yang dilakukan anggota-anggota kelompok untuk mencapai kata mufakat. Untuk mencapai kebulatan suara kelompok ini mengesampingkan motivasinya untuk menilai alternatif-alternatif tindakan secara realistis. *Groupthink* dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dalam proses pengambilan keputusan yang menunjukkan timbulnya kemerosotan efisiensi mental, pengujian realitas, dan penilaian moral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok

Teori Tekanan Kelompok adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana tekanan dari kelompok dapat mempengaruhi individu untuk melakukan konformitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konformitas antara lain adalah kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, kepercayaan terhadap penilaian sendiri, rasa takut terhadap celaan sosial, dan rasa takut terhadap penyimpangan. Dalam konteks Teori Pemikiran Kelompok (*Groupthink Theory*), *groupthink* merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif. Gejala-gejala dari *groupthink* meliputi persepsi yang keliru, rasionalitas kolektif, percaya pada moralitas terpendam kelompok, stereotip terhadap kelompok lain, tekanan langsung pada anggota yang berbeda pendapat, sensor diri sendiri terhadap penyimpangan dari sensus kelompok, ilusi bahwa semua anggota sepakat, dan lainnya.

Selain itu, tekanan dalam kelompok juga dapat berdampak pada gangguan makan pada remaja. Hubungan tekanan teman sebaya dengan gangguan makan pada remaja menunjukkan bahwa individu dalam kelompok cenderung merasa tertekan untuk mengikuti standar dan nilai desain tubuh ideal yang sama dengan anggota kelompok lainnya, dapat disimpulkan bahwa tekanan dari kelompok dapat memengaruhi perilaku individu dalam hal konformitas, pengambilan keputusan dalam kelompok, dan bahkan kesehatan mental seperti gangguan makan pada remaja.

Seseorang menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut, disebut dengan konformitas, konformitas adalah perilaku sama dengan orang lain yang didorong oleh keinginan sendiri. Sedangkan menurut Myers adalah perubahan perilaku atau kepercayaan sebagai hasil dari tekanan kelompok yang nyata atau hanya berdasarkan imajinasi agar selaras dengan orang lain. konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konformitas adalah perubahan sikap dan perilaku individu sebagai akibat dari adanya tekanan yang dibentuk oleh suatu kelompok, dimana individu berusaha agar sesuai dengan norma – norma yang ada didalam kelompok tersebut.

Simpulan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun tantangan seperti pergantian menteri

⁵ Li, K., Long, C., & Wan, W. (2019). Public Interest or Regulatory Capture: Theory and Evidence from China's Airfare Deregulation. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 161, 343-365. doi:10.1016/j.jebo.2019.03.019

dan kebijakan seringkali menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan. Investasi dalam pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang penting untuk kemajuan masyarakat dan negara serta tantangan bagi pengambil kebijakan. Teori kebijakan pendidikan di Indonesia mencakup pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan, fungsi kebijakan, arah, dan karakteristik kebijakan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 bertujuan untuk memperluas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi.

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen yang terus berubah dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena konsekuensi dari kebijakan yang salah dapat menjadi malapetaka. Investasi jangka panjang dalam pendidikan penting untuk kemajuan masyarakat dan negara serta tantangan bagi pengambil kebijakan. Kajian tentang kebijakan publik, termasuk analisis kebijakan, telah berkembang pesat dalam ilmu sosial. Analisis kebijakan membantu para pengambil kebijakan memahami proses pembuatan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia terdiri dari kumpulan konsep peraturan-undangan yang menjadi dasar sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan hak asasi pendidikan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi, serta menjamin akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

Referensi

- Knight, C., & Wiseman, A. W. (2006). Fondasi Baru untuk Memahami Keanekaragaman dalam Kebijakan dan Praktik: Implikasi Pendidikan Multikultural. *Kebijakan Pendidikan*, 20(2), 309–334.
- Li, K., Long, C., & Wan, W. (2019). Public Interest or Regulatory Capture: Theory and Evidence from China's Airfare Deregulation. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 161, 343-365. doi:10.1016/j.jebo.2019.03.019
- Moh. Shofan, (2011). *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*, Yogyakarta: Samudra Biru,
- Pius A. P, M. Dahlan, (1994). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola,
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.